

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pendidikan pada hakekatnya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berlangsung dalam proses budaya, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang berkualitas itu harus diselaraskan dengan upaya mewujudkan pembentukan identitas bangsa.

Hakekat pendidikan seperti itu menunjuk pada fungsi pendidikan sebagai wahana untuk menjadikan manusia Indonesia mendatang yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan, memelihara, dan membangun bangsa menuju masyarakat yang sejahtera dan adil berdasarkan Pancasila. Pendidikan manusia Indonesia seutuhnya, merupakan kekuatan pokok dan mempunyai peranan kunci bagi pembangunan bangsa dan pelaksanaan pembangunan. Tanpa pendidikan, pembangunan nasional tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, karena motor penggerak pembangunan, adalah manusia yang mampu membangun. Unsur manusia itu akan ada manakala pendidikan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989, menegaskan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung di jalur sekolah maupun di luar sekolah. Pada jalur sekolah dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan pendidikan di luar sekolah dapat berlangsung di lingkungan keluarga atau masyarakat.

Dimana pun proses pendidikan dilakukan, di lingkungan sekolah ataupun luar sekolah, pada hakekatnya sama, yaitu mengoptimalkan pengembangan potensi peserta didik (sumber daya manusia). Tujuan tersebut diupayakan dicapai melalui *kegiatan belajar mengajar*, suatu kegiatan interaksi antara masukan (yang diproses) dengan pendidikan (yang memproses). Proses kegiatan serupa itu tidak terdapat dalam sistem yang lain.

Di samping itu, pelaksanaan pendidikan tidak sederhana. Keragaman letak geografis bangsa dengan aneka ragam budaya, adat istiadat, dan bahasa, menuntut adanya isi dan pola pelaksanaan pendidikan yang tidak seragam. Keragaman keperluan orang Indonesia yang berlatar-belakang lingkungan alam dan pekerjaan yang berbeda menuntut pula adanya isi dan pola layanan pendidikan yang berbeda.

Berkenaan dengan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur luar sekolah, mempunyai peranan yang sederajat dengan pendidikan pada jalur sekolah. Dalam perkembangannya, PKBM sering mengalami pasang surut. Secara kuantitatif tumbuh menjamur sesuai kebutuhan masyarakat. Ada PKBM yang dapat tumbuh dan dipercaya masyarakat karena memberikan layanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Namun tidak sedikit PKBM yang mengalami kebangkrutan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok PKBM dalam menyiapkan warga belajar yang cerdas dan terampil, tentunya harus dibarengi dengan adanya kebijakan dan pembinaan yang mendorong peningkatan kualitas PKBM secara kelembagaan. Artinya, efektivitas fungsi dan peran PKBM banyak ditentukan oleh *upaya peningkatan kemampuan manajerial para pengelola PKBM itu sendiri*, karena di

tangan para pengelolah kualitas proses pendidikan direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan. Untuk itu para pengelola PKBM dituntut memiliki kualitas kemampuan yang seimbang dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Lahirnya UU.No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang lebih dikenal dengan undang-undang otonomi daerah, sangat berimplikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam tatanan manajemen pendidikan nasional, filosofi, substansi, proses dan konteks manajemen pendidikan pun berubah seiring filosofi yang terkandung dalam undang-undang otonomi daerah tersebut. Demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi semakin diprioritaskan. Reformasi senantiasa bergulir dalam upaya mencapai kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Namun demikian, apakah langkah strategik ini sudah ditunjang oleh sub sistem aktivitas manajemen yang mantap dan terintegrasi, sistem informasi yang akurat untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut? Apakah sistem aktivitas manajemen yang ada masih relevan dengan tuntutan undang-undang dan kehendak masyarakat? Pendekatan mana yang mesti kita ambil yang sesuai dengan kondisi objektif Indonesia yang beranekaragam?

Penerapan desentralisasi wewenang untuk mengemban fungsi aktivitas manajemen nampaknya merupakan alternatif yang perlu segera dilaksanakan. Pola ini tidak berbeda dengan konsep aktivitas manajemen mikro yang dikemukakan Soenarya (1988:2), yang memandang bahwa aktivitas manajemen mikro pada dasarnya merupakan lanjutan dari suatu konsep aktivitas manajemen pada semua tingkat aktivitas manajemen, namun aktivitas manajemen mikro lebih berakar pada

tingkat yang paling bawah (*grassroot level*). Aktivitas manajemen pada tingkatan makro biasanya hanya memperhatikan berbagai sasaran dan prioritas pada tingkat nasional dan atau propinsi. Sebaliknya aktivitas manajemen pendidikan pada tingkatan mikro, memodifikasi sasaran dan prioritas tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural dan dinamika kehidupan pada tingkat lokal. Perincian sasaran dan prioritas pada tingkat mikro dapat menyajikan suatu latar belakang yang lebih realistik daripada norma-norma yang bersifat abstrak yang dikembangkan pada tingkat nasional

Persoalan efektivitas penyelenggaraan PKBM ini sebetulnya ditentukan oleh banyak faktor, satu diantaranya berkaitan dengan komponen manajemen. Efektivitas manajemen kelembagaan banyak ditentukan oleh kinerja para pengelolanya. Keberhasilannya bergantung, *apakah para pengelola PKBM dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai pengelola PKBM sudah cukup efektif dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ?*

Memang, mengelola PKBM tidak dapat dipandang sebagaimana halnya mengelola lembaga pendidikan jalur persekolahan. PKBM, sebagai salah satu jenis pendidikan pada jalur luar sekolah tidak dapat dipandang sebagai sistem persekolahan. Manajemen PKBM mempunyai karakteristik tersendiri. Karena itu, mengadopsi sistem manajemen persekolahan ke dalam sistem pendidikan luar sekolah tidak akan efektif. Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan PKBM memerlukan dukungan sistem manajemen yang sesuai dengan karakteristik sistem pendidikan luar sekolah.

Berkenaan dengan banyaknya PKBM yang bubar, dan ada sebagian PKBM yang bertahan, bahkan ada yang laku keras diminati masyarakat, maka muncul persoalan; apakah penyelenggaraan PKBM didukung oleh sistem manajemen yang sesuai? Indikator apa yang dapat dijadikan ukuran? Apabila indikator yang dijadikan ukuran efektivitas penyelenggaraan PKBM ditunjukkan oleh implementasi sistem manajemen kelembagaan, mengandung arti bahwa para pengelola PKBM telah memiliki kapabilitas dalam proses-proses manajemen kelembagaan. Dengan kata lain, pengelolaan PKBM telah ditunjang oleh perangkat sistem yang memadai.

Untuk melaksanakan aktivitas manajemen diperlukan informasi yang cukup, baik informasi yang ada di lingkungan intern maupun ekstern organisasi. Kalau aktivitas manajemen tidak cukup informasi, manajemen itu sukar untuk dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu informasi yang diperlukan untuk aktivitas manajemen harus diperoleh pimpinan organisasi dalam waktu yang tepat dan dengan isi pesan yang cermat. Jadi jelas bahwa informasi sangat penting bagi para pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugas dan membuat keputusan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Idochi Anwar (1986:29), bahwa: "Informasi sudah merupakan komoditi yang nilainya semakin meningkat dan yang dibutuhkan oleh pejabat manajemen) untuk merencanakan dan mengontrol kegiatan usaha secara efektif".

Agar informasi yang ada di lingkungan intern maupun ekstern organisasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka adanya suatu sistem informasi manajemen yang merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyajikan

informasi pilihan yang berorientasi kepada keputusan yang diperlukan oleh manajemen mutlak diperlukan.

Dalam pembangunan dan aktivitas-aktivitas lainnya peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi suatu upaya penting, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi kegiatan yang sangat pokok di samping kegiatan-kegiatan lainnya, hal ini berangkat dari asumsi bahwa apabila berbicara mengenai pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik dalam arti makro maupun dalam arti mikro, maka titik tolak dari suatu persepsi yang sifatnya sangat fundamental. Diartikan fundamental yaitu bahwa bagi suatu informasi merupakan sumber daya yang tidak kalah penting kalahnya dan berpotensi. Kebutuhan akan informasi dalam berbagai kegiatan manusia baik kegiatan yang terorganisasi maupun yang dilaksanakan sangat ditunjang dengan adanya informasi yang terus menerus mulai dari persiapan kegiatan sampai berakhirnya kegiatan tersebut. Dengan kata lain informasi sangat dibutuhkan mulai dari mempersiapkan kegiatan sampai pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Kebutuhan yang akan meningkatkan akan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk organisasi pemerintah maupun swasta akan bertambah ruwet tanpa adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dikomputerisasi, perkembangan ini terjadi melalui sejumlah perubahan, sejalan makin meningkatnya pembangunan sarana pendidikan diperlukan manajemen aktivitas manajemen pembangunan yang makin efektif dan efisien.


Fenomena yang tampak dalam manajemen PKBM, dari sisi efektifitas dan relevansi pendidikan, belum memberikan kepuasan dalam meningkatkan mutu yang

dikehendaki oleh masyarakat. Apabila merujuk teori Bromley (1989), fenomena tersebut menunjukkan bahwa mutu PKBM, pada tingkat *operational level*, perlu didukung oleh perangkat sistem informasi yang solid sebagai bentuk perubahan kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan pula bahwa, baik pada tingkatan *policy level* maupun pada tingkat *organization level* dalam pandangan teori sistem, formulasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) baru pada wacana konseptual perumusan perangkat kendali sistem. Oleh sebab itu masalah perangkat operasional dan perangkat pendukung sistem, belum teranalisis secara terintegrasi.

Perangkat operasional sistem berkenaan dengan organisasi, manajemen, sumber daya dan kepemimpinan. Kajian terhadap komponen-komponen sistem tersebut sangat penting, karena sebagai suatu produk, SIM seharusnya diformulasikan berdasarkan elemen-elemen yang perlu diintegrasikan secara “sinergi”, bukan sebagai komponen yang “dikhotomi”. Artinya pada tatanan operasional, implementasi tentang komponen-komponen SIM tersebut harus merujuk kriteria rumusan SIM yang utuh, konsisten, dan mengandung data kependidikan secara komprehensif.

## **B. Fokus Penelitian**

Mengacu kepada hal itu, maka keberadaan PKBM merupakan sisi strategis dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Sisi strategis tersebut perlu didukung oleh model SIM penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang mampu menghasilkan tenaga kerja terampil dan mandiri serta mampu bersaing pada era global. Salah satu model yang berkembang dalam rangka menjawab tantangan itu ialah dalam bentuk



Magang. Namun demikian program Magang yang berkembang saat ini masih sangat terbatas, baik kuantitas maupun kualitasnya. Seperti halnya Magang yang diselenggarakan pemerintah khususnya Dirjen PLSP, di mana kebanyakan program yang dikembangkan sekedar untuk menyerap dana (dalam bentuk proyek), sehingga pengelolaan, kurikulum, serta sasaran yang dikembangkannya sangat terbatas. *Secara kuantitas magang yang dikembangkan pemerintah baru mampu menyerap 2,08 % saja dari jumlah tenaga kerja tidak terampil yang harus dibina. Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Diknas tahun 1999:2000, menyebutkan bahwa; sasaran magang dan KBU yang berjumlah 18.045.293 orang hanya terjangkau 375.169 orang (2,08%), dan dari persentase itu peserta yang mampu bekerja secara mandiri kurang lebih 35% saja.*

Kendala lain yang masih banyak ditemui diantaranya adalah relevansi bidang keahlian yang dikembangkan dalam program magang dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan masih rendah, kontribusi pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja masih minim, kemampuan dan kesiapan pengelola magang sebagai penyelenggara institusi dalam mengembangkan pembelajaran masih sangat minimal termasuk di dalamnya kesiapan dalam sistem informasi kurikulum, pengelolaan pembelajaran, strategi pembelajaran, permagang/tutor (sumber belajar), sarana prasarana dan kesiapan warga belajar.

Secara empiris, bahwa proses pembelajaran dalam program magang yang saat ini ada, terutama yang dikembangkan pemerintah khususnya Dirjen PLSP, belum menunjukkan adanya upaya ke arah pemberdayaan, sehingga warga belajarnya mandiri dalam belajar, mandiri dalam bekerja dan berusaha. Hal ini



sangat beralasan karena konsepsi pengembangan program pembelajaran kelompok belajar usaha dan magang yang berpusat pada warga belajar (*student centered*), mengutamakan aktivitas warga belajar sebagai pemegang dengan cara belajar siswa aktif dan memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk mengarahkan sendiri aktivitas belajarnya, serta pemahaman dan pengembangan konsep budaya belajar bekerja yang seharusnya menyatu dalam kurikulum dan proses pembelajaran sebagai konsepsi normatif dari sebuah program pembelajaran kelompok belajar usaha dan magang belum diaktualisasikan secara sempurna.

Tujuan pengembangan program pendidikan luar sekolah dalam bentuk program magang, tidak hanya diarahkan dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan melakukan dan melaksanakan keterampilan untuk bekal hidup dan penghidupan. Untuk mendukung hal itu, pengembangan SIM pada penyelenggaraan program magang diarahkan pada dua hal yakni: (a) dukungan informasi pendidikan bekal kerja, yang membekali pengetahuan dan keterampilan guna memasuki lapangan kerja yang ada serta diperlukan atau diciptakan. (b) mendukung informasi pendidikan jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) yang dapat mentransformasi nilai dan perilaku yang mandiri, serta terhindar dari sikap-sikap ketergantungan.

### **C. Rumusan Masalah**

Menyimak berbagai permasalahan yang dihadapi satuan PLS dalam bentuk program magang, maka persoalan penting yang harus dijawab adalah: *bagaimana model SIM untuk mengevaluasi program pembelajaran pendidikan luar sekolah dalam bentuk magang yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian warga belajar ?*

Masalah tersebut, dirinci ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut

1. Bagaimana gambaran empirik tentang Program Magang yang diselenggarakan PKBM Alpa Bandung?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan Program Magang yang diselenggarakan PKBM Alpa Bandung?
3. Bagaimana disain untuk mengembangkan SIM evaluasi peserta program Magang yang berfungsi sebagai wahana pengembangan pendidikan luar sekolah?
  - a. Bagaimana model disain analisis sistem yang diharapkan dalam SIM untuk evaluasi peserta Program Magang yang diselenggarakan oleh PKBM?
  - b. Bagaimana model perancangan sistem evaluasi peserta Program Magang yang diselenggarakan oleh PKBM?

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan salah tafsir atau salah pengertian terhadap masalah yang diteliti, sehingga menyimpangan dari tujuan, maka Penulis perlu menguraikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

*Pertama*, istilah Sistem Informasi Manajemen (SIM), sebetulnya lahir dari istilah Management Information System (MIS) yang lebih dikenal dalam konteks manajemen bisnis, yang dimaksudkan sebagai suatu metode pemrosesan fakta-fakta menjadi data, dan data menjadi informasi secara cepat, tepat dan dapat dipercaya untuk keputusan-keputusan strategis dalam aktivitas manajemen.

Dalam beberapa literatur, misalkan dari Scanlan dan Keys (1984:38) menjelaskan bahwa: “Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem formal mengenai hal melaporkan, menggolongkan dan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang tepat dalam suatu organisasi”. The Liang Gie (1987:40) merumuskan *Management Informasi System* yang diterjemahkannya “Sistem Keterangan untuk Pemimpin” sebagai suatu keseluruhan jalinan hubungan dan jaringan lalu lintas keterangan-keterangan dalam organisasi mulai dari sumber yang melahirkan bahan keterangan melalui proses pengumpulan, penggolongan, pengolahan sampai penyebaran kepada para pejabat yang berkepentingan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dan terakhir tiba pada pimpinan untuk keperluan pembuatan keputusan-keputusan yang tepat. Kemudian, menurut Yuwono dalam *Ensiklopedia Administrasi* (1989:262) menjelaskan bahwa SIM adalah keseluruhan jaringan informasi yang ditujukan kepada pimpinan untuk keperluan pelaksanaan fungsi manajemen, khususnya dalam pembuatan keputusan yang tepat, dan mencakup kegiatan-kegiatan pengumpulan, penciptakan data serta pengolahan data menjadi informasi yang siap untuk digunakan.

Berdasarkan rujukan tersebut, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa istilah Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam penelitian ini diartikan sebagai :

suatu usaha atau cara dari berbagai pihak dalam organisasi untuk dapat menyajikan suatu informasi yang terbaik, guna mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan, sehingga bila diperlukan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pada waktu yang tepat serta dapat dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam SIM, berkenaan dengan variabel perencanaan sistem, organisasi sistem, pemeliharaan dan pengendalian sistem, dan evaluasi sistem.

Pada pelaksanaannya, senantiasa tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya untuk mengatasinya. Karena itu, kedua variabel ini pun perlu dikaji, sebagai bahan masukan dalam merumuskan disain pengembangan sistem lebih lanjut. Dan selanjutnya, dirumuskan suatu model disain pengembangan sistem dalam bentuk kerangka konsep pengembangan SIM, yang mencakup variabel keluaran yang diharapkan, masukan yang perlu disiapkan, dan model proses yang perlu dilakukan sesuai dengan karakteristik program PKBM.

*Kedua*, istilah Magang, sebetulnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan pada jalur PLS, dan dapat pula dianggap sebagai salah satu metode pembelajaran. Dalam mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran program magang, tidak hanya mengukur dan mengevaluasi hasil belajar warga belajar saja, namun sistem kegiatan dan dampaknya pun harus dievaluasi. Hal ini mengandung arti evaluasi diarahkan pada evaluasi produk, proses dan dampak dari kegiatan pembelajaran itu sendiri.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penilaian ini, yakni (1) norma, (2) prosedur penilaian dan (3) alat penilaian. Norma berkaitan dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang diinginkan. Prosedur berkenaan dengan bagaimana cara penilaian itu dilakukan. Sedangkan alat penilaian berkenaan dengan instrumen dalam bentuk soal-soal yang akan diujikan pada warga belajar.

Evaluasi produk berkenaan dengan penilaian hasil belajar berfungsi sebagai alat ukur tercapai-tidaknya tujuan belajar. Evaluasi proses pada pokoknya adalah untuk mengetahui nilai sistem kegiatan pembelajaran dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, evaluasi harus berlangsung selama proses kegiatan berlangsung. Dalam

beberapa hal, evaluasi yang dilakukan sebagian dibuat dengan menggunakan test-test kuantitatif atau pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pengalaman. Evaluasi dampak berkenaan dengan pengaruh dari hasil proses pembelajaran.

Namun demikian, untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, evaluasi penyelenggaraan program magang, difokuskan pada evaluasi hasil belajar peserta (warga belajar) magang sebagai salah satu bentuk satuan program PLS yang diselenggarakan dan dikelola oleh sebuah PKBM.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu model pengembangan SIM yang dapat diimplementasikan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan PKBM sebagai lembaga penyelenggara satuan-satuan pendidikan luar sekolah. Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini ialah:

1. Menemukan gambaran empirik tentang program magang yang diselenggarakan PKBM Alpa Bandung;
2. Menemukan faktor-faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan program magang yang diselenggarakan PKBM Alpa Bandung;
3. Merumuskan disain untuk mengembangkan SIM evaluasi peserta program magang yang berfungsi sebagai wahana pengembangan pendidikan luar sekolah.

Beberapa pertimbangan yang dapat dikemukakan penulis tentang manfaat pentingnya masalah tersebut untuk diteliti adalah:

1. Hasil penelitian terhadap masalah ini baik secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen dalam aktivitas manajemen terutama dalam aktivitas pengambilan keputusan, perencanaan dan penyusunan program, serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh setiap organisasi.
2. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap efektivitas aktivitas manajemen program pembelajaran PKBM.
3. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta memberikan kontribusi dalam upaya pemahaman disiplin ilmu Administrasi Pendidikan yang penulis tekuni, terutama dalam hal aktivitas manajemen pengembangan sarana dan fasilitas pendidikan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Tantangan di bidang informasi kependidikan dewasa ini, khususnya pada kelembagaan pendidikan masih menghadapi beberapa masalah yang cukup mendasar, yaitu masalah penyediaan data dan informasi, kemampuan profesional, pelembagaan tugas dan fungsi, penyediaan informasi, pendayagunaan teknologi informasi dan kinerja lembaga yang menyediakan informasi.

Penyediaan data dan informasi dalam bidang kependidikan belum sepenuhnya merupakan kegiatan yang melembaga. Sebagian besar masih sangat tergantung kepada para pelaku organisasi secara perorangan daripada terhadap

fungsinya sebagai suatu lembaga yang mapan. Ketergantungan yang terus berlanjut terhadap beberapa orang tenaga mahir tersebut telah menjadikan pendataan statistik sebagai kegiatan rutin, tak berkembang, sangat rumit, kurang menarik, dan bahkan membosankan.

Peranan keahlian dan kemampuan profesional belum memberikan andil yang memadai dalam peningkatan mutu layanan data dan informasi. Beberapa gejala menunjukkan bahwa hasil pendataan statistik belum sepenuhnya mampu meyakinkan para pemakai baik di dalam maupun di luar lingkungan instansi pemerintah maupun swasta. Data dan Informasi yang disediakan cenderung: (1) statis, tak berkembang dan kurang lentur terhadap kebutuhan informasi yang terus berubah dan berkembang setiap waktu; (2) kurang berimbang menurut bidang garapan yang penekanannya masih lebih berat pada informasi persekolahan; (3) terlalu umum karena hanya menyajikan informasi rangkuman nasional atau propinsi; dan (4) belum disajikan secara lebih menarik dan berbeda-beda.

Pendayagunaan teknologi informasi belum optimal baik dalam penyediaan, pengolahan, dan penyajian data maupun dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Hal ini disebabkan oleh karena sampai saat ini, *database* belum disusun sebagaimana mestinya sehingga belum memungkinkan untuk disusun program-program aplikasi yang lebih berguna. Sampai saat ini teknologi informasi yang tersedia sebagian besar baru dapat dimanfaatkan sebagai sarana menghitung angka dan menulis. Sementara itu pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan sistem belum dapat dilakukan secara lebih meluas.

Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi program, dan pengawasan sistem atau proses pendidikan. Sistem pendidikan merupakan sistem yang sangat berbeda dari sistem lainnya. Karena sistem pendidikan merupakan sistem yang khas, manajemen pendidikan pun merupakan proses yang berbeda pula dari manajemen lainnya. Dalam beberapa hal memang manajemen pendidikan memiliki kesamaan dengan manajemen yang lain, bahkan mengadopsinya. Perbedaan hakiki tersebut ditunjukkan dalam aspek:

- (1) Wawasan tentang pendidikan dan komponen-komponen sistem pendidikan tidak terdapat dalam sistem manajemen lainnya;
- (2) Manajemen pendidikan senantiasa memfokuskan perhatian pada proses belajar-mengajar sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik secara optimal; karenanya perencanaan, pengorganisasian, implementasi program, dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber manusia dan material dalam pendidikan semuanya merupakan wahana penyediaan fasilitas bagi kepentingan proses tersebut;
- (3) manajemen pendidikan berorientasi pada kepentingan peserta didik, karenanya bersifat pengabdian (nonprofit orientation);
- (4) Pendidikan memiliki komponen bukan manusia (nonhuman) yang khas berupa kurikulum, metodologi (teknologi) pendidikan, dan media pendidikan. Komponen-komponen ini harus direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan, dan dilakukan pengawasannya secara khas pula;
- (5) Pendidikan memiliki komponen manusia berupa pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan



(supervisi) tenaga pendidik senantiasa bermuara pada keperluan proses belajar-mengajar yang orientasinya nirlaba, dan dalam rangka melayani kepentingan pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan lainnya juga senantiasa berorientasi pada upaya memberikan kemudahan bagi pelaksanaan proses belajar mengajar;

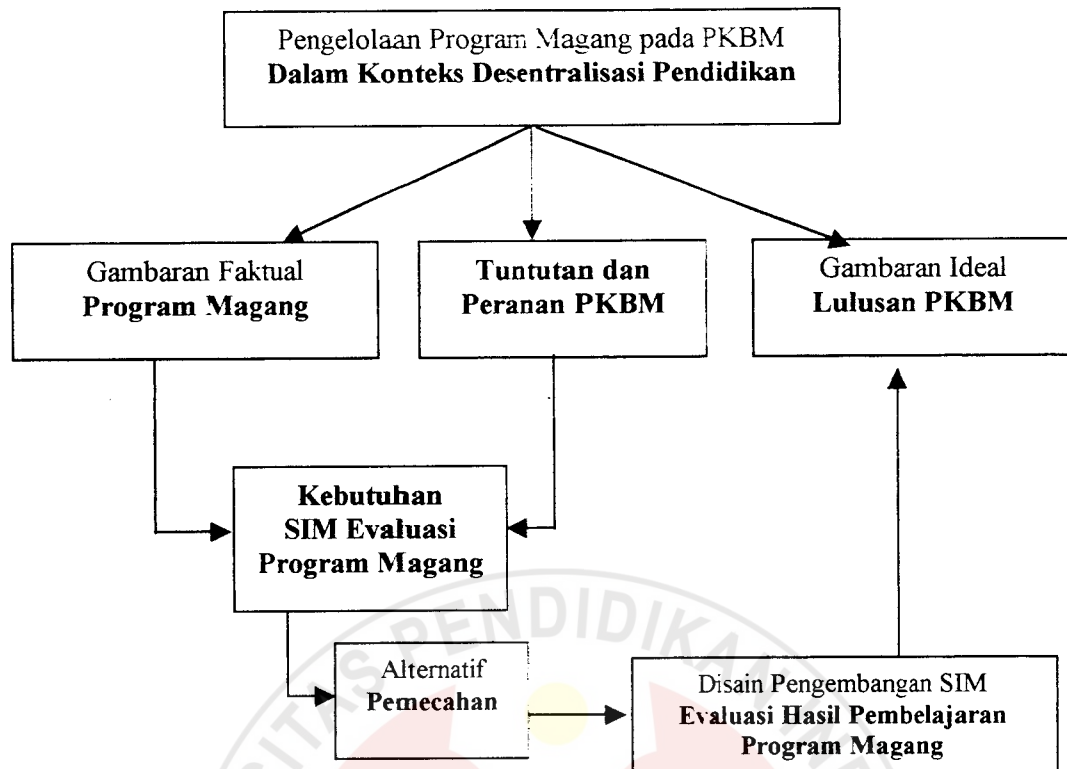
- (6) Hubungan manajerial antara manajer dan personel yang dikelola berada dalam posisi yang sederajat;
- (7) Efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan bernafaskan kependidikan yang memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Upaya mengembangkan SIM pendidikan, sebenarnya tidak terlepas dari bidang garapan manajemen pendidikan yang mencakup paling tidak dalam pengembangan sistem informasi mengenai peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan, dan hubungan dengan masyarakat.

Sistem informasi peserta didik, berkenaan dengan merancang format-format data peserta didik dan mengatur sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan informasi mengenai peserta didik. Sistem informasi kurikulum, berkenaan dengan merancang format-format data dan mengatur sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan informasi mengenai bahan ajaran (bidang studi), penjadwalan, dan program-program kurikulum lainnya. Sistem informasi tenaga kependidikan, berkenaan dengan merancang format-format data dan pengelolaan informasi tentang perencanaan kebutuhan personil,

pertimbangan seleksi untuk penempatan tugas, pembinaan dan pengembangan kariernya, dan kesejahteraan, serta pemberhentian atau pemensiunannya. Sistem informasi mengenai sarana dan prasarana sekolah, berkenaan dengan merancang format-format data dan pengelolaan informasi mengenai tanah, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah, serta pemeliharannya. Sistem informasi keuangan dan pembiayaan pendidikan, berkenaan dengan merancang format-format data dan pengelolaan informasi mengenai segala kebutuhan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. sistem informasi hubungan masyarakat, berkenaan dengan merancang format-format data dan mengelola informasi mengenai program, pelaksanaan dan kerja sama lembaga pendidikan dengan masyarakat, khususnya dengan orang tua peserta didik, termasuk mekanisme kerja dan pembagian tugasnya.

Perubahan sistem pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sistem pengelolaan pendidikan, baik pada jalur persekolahan maupun jalur luar sekolah. Dengan desentralisasi pendidikan, PKBM memiliki kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya sehingga pihak PKBM dituntut untuk lebih berperan aktif di dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara mikro. Untuk itu, pengelolaan program magang pada PKBM memerlukan dukungan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang sesuai dengan tuntutan desentralisasi pendidikan. Secara lebih jelas akan digambarkan pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1  
KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa, beranjak dari perlunya pengelolaan Program Magang pada PKBM dalam konteks desentralisasi pendidikan, patut ditelusuri dari gambaran faktual SIM evaluasi pembelajaran di lingkungan PKBM itu sendiri. Gambaran faktual SIM ini dapat saja berujud SIM yang masih konvensional, atau bahkan sudah dalam modern dalam bentuk penggunaan teknologi komputer. Tetapi, bagaimana pun bentuknya, gambaran faktual itu, tidak terlepas dari *boundary* tuntutan dan peranan PKBM dalam melayani pendidikan masyarakat. Karena itu, antara gambaran model faktual tentang SIM yang ada di lapangan dengan tuntutan dan peranan PKBM, sangat

memungkinkan muncul kesenjangan-kesenjangan yang dalam penelitian ini diistilahkan akan memunculkan problema-problema SIM khususnya dalam setiap melaksanakan program magang, yang perlu diupayakan pemecahannya melalui model-model alternatif. Dengan demikian, disain pengembangan SIM yang diupayakan melalui penelitian ini, diharapkan menjadi salah satu alternatif pemecahan problema-problema tersebut dalam menuju gambaran ideal fungsi dan peranan PKBM sebagai lembaga pendidikan masyarakat.



